

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia sistem pemerintahan sentralisasi yang ada dinilai belum mampu untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, karena sentralisasi hanya memusatkan semua urusan pemerintahan pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pada tahun 1998 kebijakan sentralisasi dirubah menjadi kebijakan desentralisasi. Kebijakan Desentralisasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan wewenang terhadap pemerintah daerah agar bisa mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>1</sup> Tujuan kebijakan desentralisasi adalah meningkatkan efektifitas serta efisiensi terhadap pelayanan masyarakat di semua lapisan mulai dari tingkatan pemerintah yang paling bawah. Di Indonesia, desentralisasi diwujudkan dengan adanya kebijakan otonomi.<sup>2</sup> Otonomi daerah adalah pemberian kebebasan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang diharapkan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Otonomi daerah dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu desa. Desa adalah kesatuan masyarakat yang di dalamnya memiliki batas-batas wilayah dan memiliki wewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.<sup>4</sup> Otonomi yang diberikan kepada desa salah satunya melalui penyaluran dana desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Pembangunan yang ada desa berperan penting karena desa menjadi bagian terdepan dalam pembangunan nasional yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019): 152–70,.

<sup>2</sup> Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 376–96.

<sup>3</sup> Sonia Nopitriilia, "Implementasi Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Di Desa Pendung Hilir Kcamatan Air Hangat," *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 3, no. 11 (2021): 95–106.

<sup>4</sup> Asep Hidayat and Selga Zira Fresh Yani, "Peran Administrasi Pembangunan Desa," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2022): 7091–7100.

<sup>5</sup> Dani H Lambuaso, Sofia Pangemanan, and Donald Monintja, "Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020).

Dana desa pertama kali di salurkan pada tahun 2015, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 (UU Desa) sebagai dasar hukum berlakunya dana desa. Pemerintah memberikan kewenangan untuk desa mengatur pemerintahannya sendiri dan terpisah dari pengaturan pemerintah daerah.<sup>6</sup> Dana desa sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan desa, karena pembangunan desa dinilai menjadi ujung tombak dari pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Dana Desa yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada di desa, meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki permasalahan yang lebih banyak. Desa tidak hanya sekedar sebagai penerima manfaat saja, namun desa di jadikan sebagai subyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Sehingga desa tidak lagi ketergantungan kepada pemerintah daerah maupun pusat.<sup>8</sup>

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/ kota. Dana tersebut di peruntukkan untuk membiayai operasinal pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup> dana desa merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat terhadap desa untuk menjalankan otonominya sendiri, sehingga diharapkan desa akan mandiri dan berkembang tidak ada lagi desa yang tertinggal.<sup>10</sup>

Adanya dana desa yang cukup besar indonesia diharapkan mampu untuk mendorong desa agar lebih maju, tidak ada lagi istilah desa tertinggal. Sehingga kesenjangan antar daerah akan berkurang

---

<sup>6</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210–29.

<sup>7</sup> Nafadhila Eka Indraswari and Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 4 (2021).

<sup>8</sup> Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa* (Pontianak Selatan: CV DERWATI PRESS, 2019), 5.

<sup>9</sup> Ilham Zitri, Rifaid Rifaid, and Yudhi Lestana, "Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 2, no. 2 (2020): 164–90.

<sup>10</sup> Larasati Prima Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 10.

dan masyarakat akan merasakan dampak yang positif dari adanya kebijakan dana desa yang ada di Indonesia.<sup>11</sup> Berikut ini merupakan data dana desa yang ada di Indonesia dari kurun waktu tahun 2021-2023 :

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa di Indonesia tahun 2021-2023**

Tahun	Dana Desa ( Triliun Rupiah )
2021	71.998.798.983.000
2022	68.000.000.000.000
2023	68.000.000.000.000

*Sumber: Kementerian Desa Republik Indonesia 2023*

Tabel 1.1 dapat dilihat dana desa di Indonesia mengalami penurunan, terjadinya penurunan tersebut karena pemerintah pusat mempertimbangkan keadaan keuangan negara akibat adanya wabah covid 19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia terfokus pada penanganan covid 19 yang ada di Indonesia dan pemulihan sektor ekonomi yang mengalami menurun drastis. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah menurunkan anggaran dana desa yang awalnya mencapai 72 triliun di tahun 2021 menjadi 68 triliun di tahun 2022 dan 2023.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menerima total dana desa tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya jumlah desa yang ada di Jawa Tengah serta tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Tengah sangat tinggi, sehingga dana desa yang diterima Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan dana desa yang diterima provinsi lain. Berikut ini merupakan penerimaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 :

**Tabel 1.2**  
**Dana Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023**

Tahun	Dana Desa ( Triliun Rupiah )
2021	8.157.169.762.000
2022	8.116.178.993.000
2023	7.850.910.791.000

*Sumber: Kementerian Desa Republik Indonesia 2023*

Tabel 1.2 adalah penerimaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah. Dana desa yang ada di Indonesia didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan sulitnya keadaan

---

<sup>11</sup> Susi Ningsih, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)," *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2019): 287-98.

geografis di suatu wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Jawa Tengah pada tahun 2021 menerima Rp. 8.157.169.762.000 tahun 2022 Rp. 8.116.178.993.000 dan pada tahun 2023 menerima sebesar Rp. 7.850.910.791.000.

Penerimaan Dana desa untuk setiap kabupaten atau kota jumlahnya berbeda-beda, hal tersebut karena dana desa untuk kabupaten atau kota dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  
 dana desa kabupaten/kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Afirmasi kab/kota + Alokasi Formula kab/kota.<sup>12</sup> Dengan rumus tersebut maka akan diperoleh dana desa kabupaten atau kota. Berikut merupakan dana desa yang diperoleh kabupaten Jepara pada tahun 2021-2023 :

**Tabel 1.3**  
**Dana Desa Kabupaten Jepara 2021-2023**

Tahun	Dana Desa
2021	250.171.633.000
2022	245.689.231.000
2023	207.388.977.000

*Sumber: Kementerian Desa Republik Indonesia 2023*

Tabel 1.3 merupakan data dana desa Kabupaten Jepara tahun 2021-2023, dari data tersebut terlihat bahwa dana desa yang diperoleh kabupaten jepara terus mengalami penurunan. Jepara menjadi Kabupaten yang menerima dana desa terkecil nomer dua Se Karisidenan Pati setelah kabupaten kudus. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten Jepara yang tidak terlalu luas dan jumlah desanya lebih sedikit dibandingkan kota-kota lain yang menerima dana desa lebih besar di Karisidenan Pati. Sehingga dana desa yang diterima kabupaten jepara tidak terlalu besar.

Pengelolaan dana desa yang terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa meliputi semua kegiatan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan atau pencatatan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa yang telah digunakan.<sup>13</sup> Dana desa yang diberikan kepada desa berbeda-beda, hal tersebut bisa dikarenakan perbedaan luas wilayah, perbedaan keadaan geografis, perbedaan banyaknya jumlah penduduk dan perbedaan tingkat kemiskinan di masing-masing desa. Hal tersebut menjadikan dana desa yang di terima desa-desa di kecamatan Bangsri mempunyai

<sup>12</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 13

<sup>13</sup> Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 3517–32.

jumlah yang berbeda-besa. Berikut ini merupakan data dana desa Kecamatan Bangsri tahun 2021-2023:

**Tabel 1.4**  
**Dana Desa Kecamatan Bangsri Tahun 2021-2023**

Desa di kecamatan bangsri	2021	2022	2023
Guyangan	2.254.227.000	2.300.272.000	1.782.342.000
Kepuk	1.606.105.000	1.609.467.000	1.142.116.000
Papasan	1.318.248.000	1.095.126.000	869.735.000
Srikandang	1.572.897.000	1.581.198.000	1.229.866.000
Tengguli	2.126.036.000	2.393.498.000	1.780.499.000
Bangsri	2.033.223.000	1.961.869.000	1.506.726.000
Banjaran	1.622.712.000	1.749.406.000	1.264.792.000
Wedelan	1.556.236.000	1.274.611.000	1.132.852.000
Kedungleper	1.423.561.000	1.441.689.000	1.031.945.000
Jerukwangi	1.662.833.000	1.655.245.000	1.373.164.000
Bondo	1.876.475.000	1.885.919.000	1.503.164.000
Banjaragung	1.746.796.000	1.471.828.000	1.209.012.000

Sumber: Kementerian Desa Republik Indonesia 2023

Tabel 1,4 adalah data dana desa kecamatan bangsri, di Kecamatan Bangsri terdapat 12 Desa yang memperoleh dana desa yang berfariatif. dari data tersebut terlihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Tengguli cukup besar dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Desa tengguli menjadi desa nomer dua yang memperoleh dana desa terbesar setelah desa guyangan. Hal tersebut dikarenakan Desa Tengguli mempunyai wilayah yang luas 937.420 ha dan jumlah penduduk yang banyak 12.488 jumlah jiwa, kondisi geografis desa tengguli berada pada dataran tinggi yaitu 500 m diatas permukaan laut. Hal tersebut membuat desa tengguli memperoleh dana desa yang lebih besar di bandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Bangsri. Dana desa yang besar menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut.

Penggunaan dana desa di Desa Tengguli sesuai dengan Permendes No 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yaitu pemulihan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa dan pengembangan wisata serta peningkatan UMKM di desa. Yang kedua adalah program prioritas nasional meliputi pencegahan dan penanganan *stunting*, ketahanan pangan, peningkatan akses kesehatan dan penurunan angka kemiskinan. Yang ke tiga pencegahan dan penanganan terhadap bencana, baik bencana alam maupun

bencana non alam seperti bencana longsor dan kebakaran rumah yang sering terjadi di Desa Tengguli. Dana desa harus berperan besar bagi bagi pembangunan desa dan berperan terhadap masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan adanya penyaluran dana desa ke setiap daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi patokan keberhasilan dalam pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat satu di jelaskan bahwa kesejahteraan merupakan adanya rasa ketentraman, kesusilain dan keselamatan dalam tatatan kehidupan baik secara meterial maupun spiritual. Sebagian masyarakat mengkaitkan kesejahteraan dengan kualitas hidup yang layak, mampu memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, mampu memperoleh akses pendidikan dan juga akses kesehatan.<sup>15</sup>

Kesejahteraan masyarakat dapat menjadikan struktur masyarakat atau negara menjadi teratur dan seimbang. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan meraka yang jauh dari kata sejahtera mendapat bantuan dari pemerintah. karena kesejahteraan umum menjadi tujuan pemerintah sesuai amanat yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Masalah pengelolaan dana desa masih perlu dilakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.<sup>17</sup>

Dana desa yang sudah disalurkan sejak tahun 2015 hingga sekarang masih banyak desa yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan secara optimal dari adanya dana desa. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa yang tidak bertanggungjawab sehingga tujuan dari adanya dana desa tidak bisa

---

<sup>14</sup> Muhammad Thomi Irvianto and Ketut Bayagkara, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo,” *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2023): 204–16.

<sup>15</sup> Elisabet Luju et al., “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten ...,” *Jurnal Projemen* 7, no. 1 (2020):37–55,

<sup>16</sup> Elisabet Luju et al., “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka,” *Jurnal Program Studi Manajemen* 7, no. 1 (2020).

<sup>17</sup> Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 10, no. 3 (2019): 41–57.

tercapai secara maksimal. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap Pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa menjadi amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa.<sup>18</sup> Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui kasus mengenai korupsi dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan juga pihak desa dalam upaya untuk mengawasi pengelolaan dana desa agar mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Masyarakat harus ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa tidak hanya pemerintah kabupaten /kota serta pemerintah desa, namun masyarakat juga harus berperan aktif membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat harus berperan aktif khususnya dalam hal perencanaan dan juga pengawasan di lapangan agar dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyelewengan.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thomi Irvianto yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo memperoleh hasil bahwa dalam pengelolaan dana desa kurang baik serta kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian Reza (2020) menyimpulkan bahwa nilai keadilan belum di rasakan masyarakat secara menyeluruh dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Kuta Barat yang artinya dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gampong Kuta Barat masih belum merata dirasakan masyarakat dan dianggap kurang transparan dalam pengelolaannya.<sup>22</sup> Sedangkan dalam penelitian yang

---

<sup>18</sup> Ningsih, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)."

<sup>19</sup> M. Sulkhanel Umam Vidya Vitta Adhivinna, Mega Selawati, "Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa," *JAA* 6, no. 2 (2022): 63–74,

<sup>20</sup> Telaumbanua Aferiaman and Ziliwu Noferius, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)* 1, no. 1 (2022): 108–23.

<sup>21</sup> Irvianto and Bayagkara, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo." *Jurnal Riset Manajemen* 1 no 2 (2023)

<sup>22</sup> Reza Fahlevi, "Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang" (UIN AR-RANIRY, 2020).

dilakukan oleh Mela (2022) memperoleh hasil bahwa penggunaan dana desa masih belum efektif dan masih banyak kendala seperti perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan prioritas dan dalam hal pengawasan masih belum berjalan secara efektif.<sup>23</sup>

Kebaharuan ( novelty ) dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dana desa yang lebih luas yaitu mencakup dalam lima tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya membahas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya saja. Terdapat fenomena gap dan inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu, sehingga masih perlu untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk membahas mengenai pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang sudah ada, Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan agar penelitian tidak melebar dari topik yang dibahas dalam penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengenai pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tengguli dan bagaimana pengelolaan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa yang Ada di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?
3. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa yang Ada di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?

---

<sup>23</sup> Mela Wirga Astika, Febri Yuliani, and Seno Andri, "Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3599–3611.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana yang ada di DesaTengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoris
  - a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai sarana dalam menerapkan pemahaman teoritis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam permasalahan kehidupan sebenarnya.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama.
  - c. Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya pada bidang studi ekonomi mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Peneliti dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di desa
  - b. Bagi pengambil kebijakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolan dana desa
  - c. Sebagai sumber rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan dana desa
  - d. Sebagai sumber rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan kemiskinan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi sistematika penulisan menjadi hal penting yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagian awal**

Bagian awal dalam penelitian ini adalah halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan majelis ujian, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman

transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab yang antar bab nya saling berhubungan, adapun kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan penelitian

**BAB II** : Kerangka Teori

Pada bab ini berisikan mengenai kajian teori, hasil penelitan terdahulu, kerangka berfikir.

**BAB III** : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan pada penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang berupa gambaran mengenai objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

**BAB V** : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran

3. Bagian akhir

Pada bagaian ini berisikan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penulisan skirpsi dan berisikan lampiran-lampiran.